

SLEMAN TAK NAIKKAN NJOP SPPT PBB-P2 Gunakan QR-Code



Bupati Kustini didampingi Haris Sutarta menyerahkan SPPT PBB-p2 kepada salah satu wajib pajak selektif.

SLEMAN (KR) - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman terus berupaya menyempurnakan mekanisme pelayanan publik yang terkait dengan PBB-P2. Penyempurnaan itu meliputi permohonan pelayanan PBB sebanyak 11.894 berkas terdiri dari pendaftaran objek pajak baru sebanyak 288 objek pajak, mutasi objek dan subjek pajak sebanyak 4.440 objek pajak, pembetulan sebanyak 374 objek pajak, permohonan salinan sebanyak 5.655 objek pajak dan lain-lain.

"Salah satu upaya penyempurnaan yang dimaksud adalah mempercepat penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2. Untuk kesekian kalinya pada tahun 2022 ini, penyampaian SPPT PBB P2 dilaksanakan pada hari pertama masuk kerja di tahun 2022, yakni pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022," ungkap Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta pada penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2022 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sleman, Senin (3/1).

Penyerahan SPPT PBB-P2 dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kustini kepada lima kalurahan yakni Sendangmulyo, Merdikorejo, Girikerto, Condongcatar dan Sendangtirto. Sedangkan untuk Wajib Pajak Selektif diserahkan kepada perwakilan 10 wajib pajak dengan kriteria 10 ketetapan PBB-P2 tertinggi, di antaranya PT Pakuwon Permai, Hyatt

Regency Hotel Yogyakarta, PT Garuda Mitra Sejati/Jogja City, Garuda Mitra Sejati/Sleman City, PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera, Ambarukmo Plaza, Angkasa Pura I PT/TNI AU, PT. Sunindo Prima Land, PT. Adhi Persada Proserti, Alfa Retailindo PT Transmart, dan Universitas Islam Indonesia.

Dijelaskan Haris, untuk ketetapan PBB P2 tahun 2022 ini Pemkab Sleman tidak menepuh kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara massal, kecuali beberapa objek pajak khusus yang bernilai komersial tinggi. Pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2022 adalah sejumlah 657.825 lembar SPPT dengan nominal ketetapan Rp 91.740.546.385.

"Pada tahun 2022 terdapat inovasi yang dilakukan pada SPPT PBB-P2 tahun 2022 ini adalah penggunaan QR Code (Quick Response) untuk menggantikan tanda tangan dan cap basah pada SPPT-P2 tahun 2022. QR code ini merupakan bentuk evaluasi dari barcode yang nantinya berisi informasi tentang data objek pajak, dan juga tagihan PBB-P2 selama 8 tahun terakhir. Meskipun tidak menggunakan tanda tangan dan cap basah, SPPT ini tetap dokumen yang sah sesuai dengan Perbup No. 50 Tahun 2021 pasal 15 yang menerangkan bahwa dokumen SPPT dengan tanda tangan digital yang berupa QR Code merupakan dokumen yang sah," tandas Haris. (Has)-d

KUNJUNGAN WISATAWAN MENINGKAT Libur Nataru, Okupansi Hotel Tembus 95%



KR-Istimewa

Wisatawan menikmati keindahan Candi Sambisari.

SLEMAN (KR) - Tingkat hunian hotel di Sleman saat libur Natal Tahun dan Baru (Nataru) kemarin rata-rata 52% sampai dengan 95%. Aktivitas hotel di wilayah Sleman juga sudah sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman No. 39/INSTR/2021 dan SE Kadinas Pariwisata Sleman No. 440/1112 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 pada Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, yang intinya adalah secara bersama berupaya mencegah potensi penyebaran Covid 19.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Sleman Suparmono di Sleman, Senin (3/1). "Aktivitas di hotel pada perayaan malam tahun baru sebatas acara gala diner di restoran dengan dihias atribut pergantian tahun baru yang

sampai kurang lebih pukul 22.00," ujarnya.

Sementara untuk kunjungan wisatawan pada liburan tahun baru, Sabtu dan Minggu pada destinasi wisata di Sleman rata-rata mengalami kenaikan. Wisatawan masih memilih destinasi alam atau terbuka untuk tujuan berlibur serta masih didominasi oleh kelompok-kelompok kecil keluarga.

"Berdasar pemantauan di sejumlah destinasi wisata, misalnya kunjungan ke Breksi secara rata-rata tidak jauh berbeda dengan angka kunjungan libur Natal di akhir pekan libur tahun baru ini tercatat sejumlah 5.329 pengunjung, Studio Alam Gamplong naik 36% menjadi 2.435 pengunjung, Grojogan Watu Purbo naik 77% menjadi 2.241 pengunjung, Sindu Kusuma Edu Park naik 46%

menjadi 1.652 pengunjung, Jogja Exotarium relatif sama yaitu 1.861 pengunjung, Tlogo Muncar dan Kalikuning Park naik lebih dari 250% menjadi 3.573 pengunjung," beber Suparmono.

Sementara Candi Ijo - Candi Sambisari - Candi Banyunibo dikunjungi 664 pengunjung. Dan untuk jumlah kunjungan di Candi Prambanan mengalami peningkatan 26% menjadi 14.813 pengunjung. Destinasi museum juga menjadi tujuan yang cukup menarik bagi wisatawan. Terdapat secara akumulasi kunjungan ke museum Ullen Sentalu, Monumen Jogja Kembali dan Museum Afandi dikunjungi oleh 2.085 pengunjung. Wisata air Jogja Bay ada kenaikan 120% menjadi 6.989 pengunjung dan Citra Grand Mutiara naik 20% menjadi 381 pengunjung. Kawasan wisata Kaliurang naik 45% menjadi 15.052 dan Kalidadem naik 33% menjadi 7.902 pengunjung. "Dari pantauan di lapangan, baik pengelola destinasi dan usaha pariwisata, maupun wisatawan memakai masker dalam beraktivitas, dan melakukan cuci tangan/memakai hand sanitizer sebelum memasuki destinasi wisata," jelas Suparmono. (Has)-d

52 Pejabat Fungsional Dilantik Bupati

SLEMAN (KR) - Jelang akhir tahun 2021, Bupati Sleman Kustini melantik dan mengambil sumpah 52 Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemkab Sleman tahun 2021 di Pendapa Parasama. Pelantikan tersebut merupakan langkah pertama untuk pengembangan sistem kerja baru berbasis fungsional dan untuk menguatkan perubahan pola pikir jabatan fungsional.

Menurut Bupati, pelantikan ini adalah angkatan pertama yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri nomor 800/8527/OT-DA tanggal 24 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemkab Sleman. Persetujuan ini terutama untuk jabatan fungsional pada tujuh perangkat daerah di Pemkab Sleman, yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun jabatan fungsional pada perangkat daerah lainnya akan menyusul setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri.

"Kinerja jabatan fungsional mempertimbangkan kompetensi atau kesesuaian latar belakang pendidikan, keahlian, minat dan bakat. Oleh karena itu sebagai pejabat fungsional harus dapat menunjukkan kinerja yang optimal pada jabatan masing-masing," ujarnya, kemarin.

Bupati juga menegaskan, pelantikan jabatan fungsional ini merupakan salah satu langkah untuk menyederhanakan birokrasi agar menjadi efektif dan efisien. Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 tahap yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. (Has)-d

ANTISIPASI KLITHIH, POL PP DIMINTA PATROLI

Titik Rawan Bakal Dipasangi CCTV

SLEMAN (KR) - Maraknya kasus klithih di wilayah Kabupaten Sleman mendapat perhatian khusus dari Bupati. Perbuatan kriminal (klithih) ini merupakan kasus yang perlu segera diselesaikan dengan melibatkan seluruh pihak dalam penyelesaiannya.

"Remaja usia produktif memiliki kesempatan untuk menjadi anak kreatif dengan memberikan kesempatan terlibat dalam kegiatan positif baik di bidang akademis maupun non-akademis seperti kegiatan olahraga, kesenian dan lainnya. Dari beberapa kasus yang terjadi, anak-anak ini rata-rata masih kurang edukasi, terutama akibat dari perbuatan itu sendiri yang bisa berurusan dengan hukum. Jika anak-anak yang punya energi lebih ini diarahkan pada hal-hal positif, tentu akan sangat bagus," ungkap Bupati Kustini saat dikonfirmasi di Sleman, Senin (3/1).

Bupati sepakat jika tindakan klithih merupakan tindakan krimi-

nal yang tidak dibenarkan dalam norma masyarakat maupun hukum. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk terlibat di dalam permasalahan ini terutama peran aktif dari orangtua.

"Sebenarnya ini perlu kepekaan dari orangtua juga. Aktivitas anak di atas jam 21.00 itu ngapain aja perlu dipantau dan harus tegas juga kalau hanya untuk main atau nongkrong. Karena kalau dari keluarga saja istilahnya membiarkan, tentu ini tidak akan selesai," jelasnya.

Sementara, untuk menunjang tersalurkannya jiwa kreatif dan tidak bisa diam anak remaja, Bupati

menyebut fasilitas wifi gratis padukuhan dan sport center di tiap Kapanewon akan menjadi solusi dari penanganan klithih jangka menengah.

Sedangkan langkah jangka pendek yang akan segera dilakukan adalah meminta Satpol PP bersama lintas sektoral lain untuk mengintensifkan patroli pada jam-jam rawan. Terutama pengawasan pada titik-titik yang selama ini rawan tindakan klithih. Selanjutnya bersama dengan kepolisian akan berkolaborasi untuk pemasangan CCTV untuk memantau.

"Saat ini kita sedang rancang indikator-indikator yang berkaitan dengan klithih. Agar langkah atau upaya selanjutnya bisa lebih masuk pada akar permasalahan. Harapan kita semua Sleman aman, Yogya aman dan remaja-remaja ini menjadi agen-agen perubahan yang berdampak positif," pungkask Bupati. (Has)-d

Kebijakan PTM 100 Persen Tunggu Evaluasi

SLEMAN (KR) - Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen menunggu hasil evaluasi selama dua minggu pascaliburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sedangkan untuk pembelajaran saat ini hingga dua minggu ke depan masih secara terbatas seperti semester yang lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana mengaku sudah mengeluarkan edaran bahwa mulai 3 Januari hingga dua minggu ke depan, pembelajarannya masih seperti semester kemarin yakni PTM terbatas. Setelah dua



KR-Saifulah Nur Ichwan

Ery Widaryana minggu, akan melakukan evaluasi.

"Saat ini pembelajaran masih seperti kemarin. Nanti akan kami evaluasi selama dua minggu ke depan. Kenapa kita menun-

gu dua minggu, kami akan lihat bagaimana penyebaran Covid-19 pascaliburan Nataru," Ery kepada KR, Senin (3/12).

Lebih lanjut dikatakan, untuk melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, pihaknya tidak tergesa-gesa. Kebijakan itu akan diambil setelah evaluasi dari pelaksanaan PTM selama dua minggu ini. "Kami harus betul-betul cermati situasi dua minggu ini. Kalau memang situasi sudah landai dan aman (penyebaran Covid-19), baru kami berani mengambil kebijakan PTM 100 persen di Kabupaten Sleman,"

tegasnya.

Menurutnya, dalam evaluasi tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan bersama Tim Satgas Covid-19 dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Hal itu untuk menerima masukan dari Tim Satgas Covid-19 terkait penyebaran covid-19 di Kabupaten Sleman. "Tentu dalam menentukan kebijakan PTM 100 persen, kami harus mendapat masukan dari beberapa pihak utamanya dari Satgas Covid-19 Sleman. Harapannya PTM 100 nanti aman dari penyebaran Covid-19," imbuh Ery. (Sni)-d

Kedaulatan Rakyat EPAPER www.kr.co.id



Berlangganan
Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.